

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual menjelaskan bagian dari laporan penelitian yang berisi tentang penjelasan tentang teori yang relevan dengan tema penelitian dan menjelaskan tentang variabel pada penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Stakeholder Theory

Menurut Freeman (1984), *Stakeholder Theory* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memenuhi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. (Maulidiavitasari & Yanthi, 2021; Rahmadhani et al., 2022; Hadiani & Mulyani, 2023; Amalia et al., 2024). *Stakeholder* adalah sekumpulan individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian sebuah perusahaan (Yudha et al., 2025). *Stakeholder* bisa berasal dari internal maupun eksternal perusahaan seperti saham, karyawan, konsumen, pemasok dan masyarakat dan sebagainya (Arsy & Amin, 2025). Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara perusahaan dan pihak terkait saling mempengaruhi satu sama lain dalam kedua arah (Amalia et al., 2024). Tujuan utama dari teori pemangku kepentingan adalah memahami dan mengelola hubungan antara sebuah organisasi dengan para pemangku kepentingannya (Yudha et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang baik dapat

menimbulkan kepercayaan pemangku kepentingan untuk berinvestasi uang mereka ke dalam perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut (Gunawan & Berliyanda, 2024).

2.1.2 Contingency Theory

Menurut Otley (2016), menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya tergantung pada gaya kepemimpinan yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam mengelola situasi yang dihadapi. Selain itu, setiap perusahaan memiliki ciri-ciri yang berbeda, tergantung pada gaya kepemimpinan yang digunakan dan kondisi lingkungan yang dihadapi masing-masing (Safitri et al., 2020). Adanya teori kontingensi menyatakan bahwa ada variabel lain yang bisa memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Lesmana & Kesaulya, 2022).

Teori Kontingensi menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin dalam berbagai jenis organisasi (Mujahidah & Wulansari, 2021). Kinerja seorang pemimpin dapat dinilai dari pemahamannya terhadap situasi dan kondisi perusahaan yang dipimpinnya (Safitri et al., 2020). Perusahaan besar memerlukan strategi untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien guna menghindari masalah atau ketidakpastian yang disebabkan oleh dampak lingkungan dari operasi mereka (Lesmana & Kesaulya, 2022).

2.1.3 Green Accounting

Green Accounting merupakan suatu konsep akuntansi yang mengintegrasikan aspek biaya dan anggaran lingkungan ke dalam aktivitas operasional perusahaan (Rodiah & Jayengsari, 2024). Menurut (Lako, 2018) dalam Nisa et al., (2020)

Green Accounting merupakan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi mengenai objek, transaksi, peristiwa, serta dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, maupun perusahaan itu sendiri. Seluruh informasi tersebut disajikan secara terintegrasi dalam pelaporan akuntansi sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna informasi dalam melakukan penilaian serta mengambil keputusan, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Selain itu peran *Green Accounting* adalah membantu menangani masalah sosial dan lingkungan, yang juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara secara berkelanjutan, dan membentuk cara perusahaan mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Fitriyani & Sungkar, 2024). Dengan menerapkan *Green Accounting*, perusahaan bisa mengetahui, menghitung, dan menyampaikan informasi mengenai biaya-biaya yang terkait dengan dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan.

Penerapan *green accounting* oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam *Stakeholder Theory*. Para pihak yang terlibat tidak hanya memperhatikan keberhasilan keuangan perusahaan, tetapi juga peduli terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, mereka ingin tahu seberapa besar perusahaan memperhatikan dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasionalnya (Ramadhani et al., 2022). *Green Accounting* bertujuan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai biaya yang timbul karena aktivitas perusahaan terhadap lingkungan serta dampaknya terhadap kinerja

keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, penerapan akuntansi hijau diharapkan bisa memberikan manfaat nyata dalam upaya menjaga lingkungan hidup (Putra et al., 2024).

Dalam penelitian ini, *Green Accounting* diukur dengan menggunakan nilai Logaritma Natural (Ln) dari total biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan (Kiuk et al., 2025). Biaya lingkungan didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan upaya perusahaan dalam meminimalkan dampak negatif kegiatan produksi terhadap lingkungan (Siagian, 2021). Beberapa jenis biaya yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari penerapan Green Accounting meliputi biaya pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran lingkungan, rehabilitasi atau pemulihan lingkungan, dan pengurangan emisi (Saputri & Kusumastuti, 2025). Pengukuran *Green Accounting* dirumuskan sebagai berikut:

$$GA = \text{Ln (Total Biaya Lingkungan)}$$

Keterangan:

GA = *Green Accounting*

Ln = Logaritma Natural

Total Biaya Lingkungan adalah seluruh jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pengelolaan, pemeliharaan, serta perlindungan terhadap lingkungan selama satu periode pelaporan.

2.1.4 Carbon Emmision Disclosure (CED)

Carbon Emission Disclosure merupakan pengungkapan informasi mengenai terjadinya karena pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon, seperti

karbon dioksida, LPG, solar, dan bahan bakar lainnya, yang akhirnya dilepaskan ke atmosfer (Shafira, 2024). Emisi karbon di atmosfer meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah di seluruh dunia dan di Indonesia telah memperkenalkan peraturan yang mendorong bisnis dan industri untuk mengurangi emisi mereka dengan Bisnis dan industri dipilih karena dianggap sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar. Pelaporan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah dan dampak emisi karbon dari perusahaan (Maulidiavitasari & Yanthi, 2021). *Carbon Emission Disclosure* dilaksanakan sebagai wujud komitmen serta tanggung jawab perusahaan pada lingkungan (Arsy & Amin, 2025).

Carbon Emission Disclosure bisa berasal dari aktivitas alami atau dari tindakan manusia. Contoh alami dari sumber-sumber itu seperti pernapasan dan pelepasan yang terjadi di dalam laut. Emisi karbon yang datang dari tindakan manusia meliputi penebangan hutan, pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, serta penggunaan transportasi (Shafira, 2024). Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi Pengungkapan Emisi Karbon, salah satunya adalah *Carbon Disclosure Project* (CDP) (Anggraeni, 2024). Dalam penelitian ini, *Carbon Disclosure Project* (CDP) digunakan sebagai alat utama untuk menilai laporan mengenai emisi karbon. Penggunaan *Carbon Disclosure Project* (CDP) bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan tepat tentang faktor-faktor yang memengaruhi laporan emisi karbon perusahaan.

$$CED = \frac{\text{Jumlah skor dari item yang diungkapkan}}{\text{Nilai maksimal skor pengungkapan}}$$

Keterangan

CED : *Carbon Emission Disclosure*

2.1.5 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan upaya perusahaan dalam menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui berbagai bentuk dukungan terhadap pelestarian alam. Kinerja ini mencakup pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, konservasi air, dan pemenuhan regulasi lingkungan (Damas et al., 2021). Kinerja lingkungan dianggap sebagai indikator penting yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan berpotensi meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Rahmawati & Yuyetta, 2024).

Di Indonesia, penilaian kinerja lingkungan perusahaan dilakukan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mendorong dan memantau kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (Rodiah & Jayengsari, 2024). Kinerja lingkungan mengacu pada semua aktivitas yang menunjukkan bagaimana suatu perusahaan menangani lingkungan sekitarnya dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait (Dita & Ervina, 2021).

Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan diukur berdasarkan peringkat PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Nisa et al., 2020). (Maryanti & Hariyono, 2020) PROPER mengevaluasi beberapa aspek penting terkait ketaatan perusahaan terhadap aturan lingkungan, seperti pengelolaan pencemaran air, udara, dan laut, penanganan

limbah berbahaya dan beracun (B3), serta pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kinerja Lingkungan diukur menggunakan penilaian peringkat PROPER dengan skala interval (Khasanah et al., 2023).

Tabel 2.1
Indikator Peringkat PROPER

Tingkat	Keterangan	Skor
Emas	Sangat Bagus	5
Hijau	Bagus	4
Biru	Cukup	3
Merah	Buruk	2
Hitam	Sangat Buruk	1

Sumber: <https://proper.menlhk.go.id>

Dengan pendekatan ini, upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Tabel 2.2
Kriteria penilaian Peringkat PROPER

Warna	Keterangan
Emas	Bagi perusahaan atau organisasi yang secara konsisten menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik dalam kegiatan produksi maupun penyediaan jasa, penerapan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial merupakan hal yang penting.
Hijau	Bagi para pengusaha yang sudah menerapkan prinsip 4R yaitu mengurangi, mengulang, daur ulang, serta pemulihan dalam beroperasi sehari-hari.
Biru	Bagi organisasi dan pelaku usaha yang telah menerapkan praktik pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Merah	Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak mengikuti peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Hitam	Bagi pelaku usaha atau organisasi yang secara sengaja tidak melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran, kerusakan, atau pencemaran lingkungan hidup.

Sumber: (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, 2019)

2.1.6 *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat dalam bisnis dan membangun lingkungan kerja yang kondusif (Dicky Aprizal & Rosini, 2024). Menerapkan praktik *Good Corporate Governance* adalah salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak yang berkepentingan (Aprizal & Rosini, 2024). *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang digunakan dalam mengelola kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik dan efektif, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang tepat. Sistem ini memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen, guna mencapai tujuan organisasi sekaligus memastikan bahwa perusahaan menjalankan prinsip keberlanjutan yang seharusnya dipenuhi (Sary et al., 2025).

Sistem *good corporate governance* yang dimoderasi, perusahaan dapat lebih mengoptimalkan analisisnya, terutama dalam mengukur kinerja lingkungan dan efektivitas pencatatan menggunakan *green accounting*. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan berada pada kondisi terbaiknya apabila menerapkan *good corporate governance*, dan perusahaan akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya (Fajriah & Jumady, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan (Wulan et al., 2024). Sistem ini menjelaskan cara pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola perusahaan berkomunikasi dan bekerja sama, serta cara nilai-nilai tata kelola diterapkan dalam

proses pengelolaan perusahaan (Rahmawati & Jaya, 2021). Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh para manajer dapat memengaruhi kemampuan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki saham dari pihak manajemen, seperti direktur dan komisaris, secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan karena proporsi saham yang dimiliki oleh manajer atau direksi dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan tingkat presentase kepemilikan saham oleh pihak luar manajemen yang secara aktif melakukan monitoring terhadap kinerja. Kepemilikan saham oleh lembaga memiliki peran penting dalam mengawasi cara manajemen perusahaan bekerja. Kepemilikan institusional bisa berasal dari berbagai lembaga, seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, atau lembaga lainnya mendorong peningkatan yang dimiliki oleh institusi (perbankan, lembaga investasi, insurance company, pemerintah) yang berperan sebagai mekanisme monitoring eksternal. Di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga, kepemilikan, atau bisnis dengan perusahaan sehingga mampu melakukan pengawasan secara objektif dan independen. Di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independensi}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

4. Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang bekerja secara profesional dan mandiri, dibentuk oleh dewan direksi tugasnya adalah membantu serta memperkuat peran dewan komisaris atau dewan pengawas dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan, audit, serta penerapan tata kelola perusahaan di dalam perusahaan. Pernyataan itu menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{KA = \sum \text{Komite Audit}}$$

5. Reputasi KAP

Reputasi kantor akuntan publik menunjukkan seberapa dikenalnya nama kantor tersebut dan seberapa baik kualitasnya. Semakin besar reputasinya, semakin baik pula nama kantor akuntan publik itu. Sehingga kualitas laba perusahaan juga meningkat dan meningkatkan kepercayaan para pengguna informasi laporan keuangan. Reputasi KAP diukur berdasarkan besarnya KAP tersebut, yaitu KAP besar empat dan KAP yang bukan besar empat. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* (GCG) diukur dengan menggunakan indikator yaitu

persentase komisaris yang independen.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya sudah memberikan hasil yang terkait dengan penelitian ini, seperti berikut ini:

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Yang Relevan

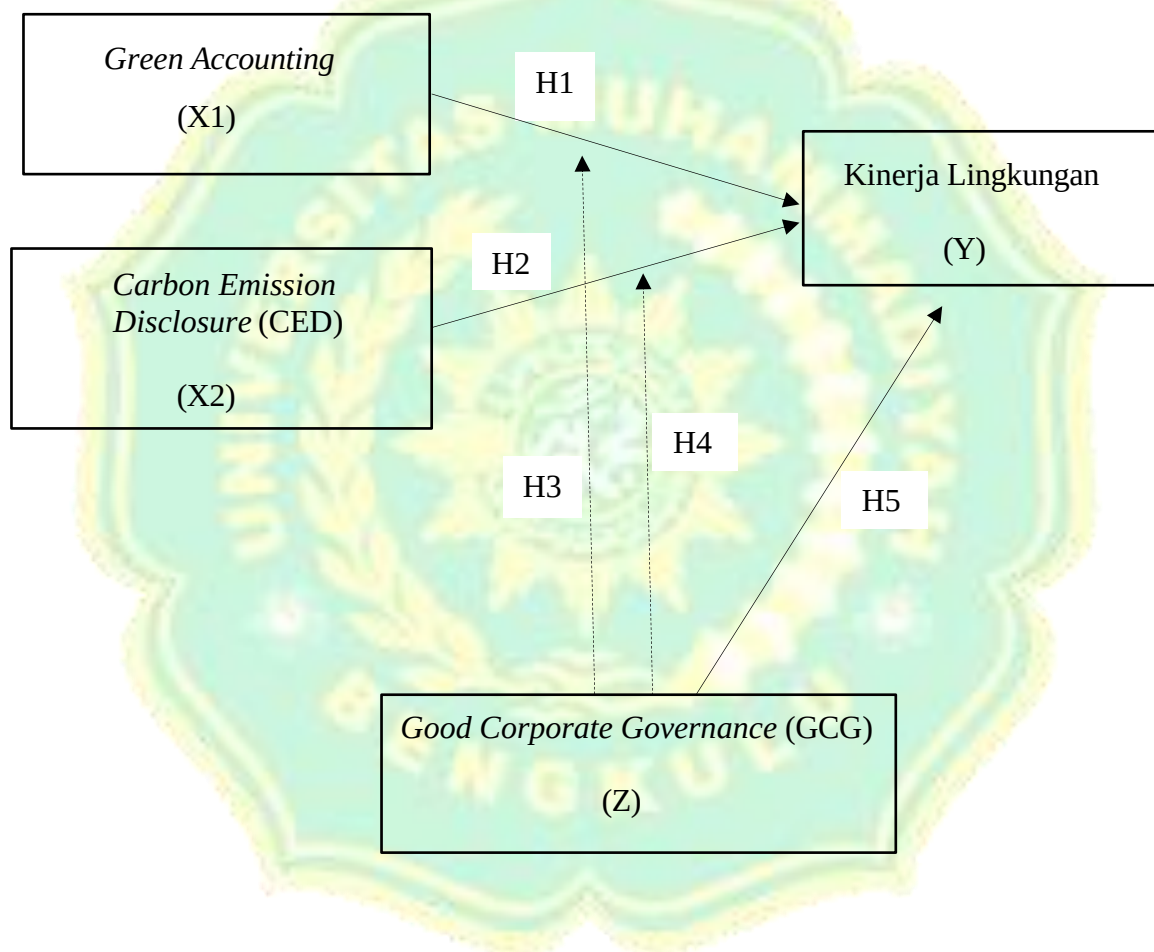
No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Kamila Ramadhani, Muhammad Sena Saputra, Lidia Wahyuni (2022)	Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Menunjukkan bahwa, green accounting berdampak positif pada kinerja keuangan, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja keuangan, tata kelola perusahaan memperkuat green accounting terhadap kinerja keuangan, dan tata kelola perusahaan memperkuat kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.
2.	Pipit Arum Septiana, Putu Agus Ardiana (2024)	Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon pada Kinerja Lingkungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lingkungan.
3.	Muhammad Zaikin, Alimuddin, Nadhirah Nagu, Afdal (2024)	Pengaruh Carbon Emission Disclosure Dan Green Innovation Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi	adanya dampak positif dan signifikan carbon emission disclosure dan green innovation terhadap nilai perusahaan. GCG mampu memoderasi hubungan antara pengungkapan carbon emission disclosure dan green

			innovation terhadap nilai perusahaan.
4.	Aliyyah Fitriyani, Musa Said Sungkar (2024)	Pengaruh Penerapan Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green accounting, kinerja lingkungan, dan profitabilitas secara positif dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan.
5.	Kafi Ezra Ramdani, Arie Apriadi Nugraha (2024)	Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022)	Menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, pengungkapan emisi karbon dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
6.	Salmah Pattisahusiwa, Aisyah Kurnia Sari (2025)	Dampak Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Ekonomi	pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa green accounting berpengaruh positif terhadap economic performance.

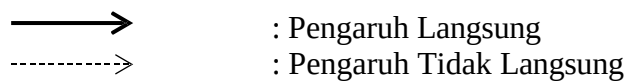
2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting* dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kinerja Lingkungan yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan energi di Indonesia.

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



Keterangan Gambar



2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas, spesifik, dan terukur mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi ini mencakup uraian mengenai pengertian setiap variabel, metode pengukuran, instrumen yang digunakan, serta skala pengukuran yang diterapkan.

2.4.1 Kinerja Lingkungan (Y)

Menurut Ezra Ramdani & Apriadi Nugraha (2024), Kinerja lingkungan merupakan bentuk usaha dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga lingkungan tetap terjaga dan mengurangi dampak buruk dari kegiatan operasionalnya. Usaha tersebut bisa memperkuat kepercayaan para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan dinilai berdasarkan peringkat yang diberikan oleh Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Paneka & Amanah, 2025).

Kinerja lingkungan mengacu pada semua aktivitas yang menunjukkan bagaimana suatu perusahaan menangani lingkungan sekitarnya dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait (Dita & Ervina, 2021). Dalam penelitian ini, variabel kinerja lingkungan diukur berdasarkan peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Nisa et al., 2020).

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi PROPER terdiri dari:

1. Nilai 5, perusahaan mendapatkan sertifikasi PROPER berwarna emas.
2. Nilai 4, perusahaan mendapatkan sertifikasi PROPER berwarna hijau.

3. Nilai 3, perusahaan mendapatkan sertifikasi PROPER berwarna biru.
4. Nilai 2, perusahaan mendapatkan sertifikasi PROPER berwarna merah.
5. Nilai 1, perusahaan mendapatkan sertifikasi PROPER berwarna hitam.

2.4.2 *Green Acccounting* (X1)

Green Accounting meliputi serangkaian proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, serta pengalokasian biaya lingkungan ke dalam aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, *Green Accounting* juga menunjukkan bahwa perusahaan mengakui tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan memberikan informasi tentang lingkungan kepada para pihak yang tertarik melalui laporan keuangan (Riyadh et al., 2020). Biaya yang termasuk dalam penerapan *Green Accounting* mencakup biaya untuk mencegah dampak lingkungan, biaya untuk mengevaluasi atau mendeteksi masalah lingkungan, biaya akibat kegagalan internal, serta biaya akibat kegagalan eksternal, baik yang sudah terjadi maupun yang masih bisa terjadi (Falih & Ifada, 2025).

Menurut Rodiah & Jayengsari, (2024) *Green Accounting* tidak hanya tentang menghitung biaya saja, tetapi juga menjaga agar perusahaan bekerja dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. *Green Accounting* bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai berbagai biaya yang muncul akibat aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja finansial perusahaan jangka panjang. serta memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya melestarikan dan menjaga lingkungan tetap berkelanjutan (Putra et al., 2024).

Dalam penelitian ini, Green Accounting dihitung dengan menggunakan Logaritma Natural (Ln) dari Total Biaya Lingkungan (Kiuk et al., 2025). Biaya lingkungan didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan upaya perusahaan dalam meminimalkan dampak negatif kegiatan produksi terhadap lingkungan (Siagian, 2021). Pengukuran *Green Accounting* dirumuskan sebagai berikut:

$$GA = \text{Ln (Total Biaya Lingkungan)}$$

Keterangan:

GA = *Green Accounting*

Ln = Logaritma Natural

Total Biaya Lingkungan merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan perlindungan lingkungan selama satu periode pelaporan.

2.4.3 Carbon Emission Disclosure (X2)

Carbon Emission Disclosure merupakan pengungkapan informasi mengenai terjadinya karena pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon, seperti karbon dioksida, LPG, solar, dan bahan bakar lainnya, yang akhirnya dilepaskan ke atmosfer (Shafira, 2024). Emisi karbon di atmosfer meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah di seluruh dunia dan di Indonesia telah memperkenalkan peraturan yang mendorong bisnis dan industri untuk mengurangi emisi mereka dengan Bisnis dan industri dipilih karena dianggap sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar. Pelaporan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah dan dampak emisi karbon dari perusahaan (Maulidiavitasari & Yanthi, 2021). *Carbon Emission*

Disclosure diukur menggunakan *Carbon Disclosure Project* (CDP), mengelompokkan item pelaporan menjadi 5 kategori dan 18 item pengungkapan. Skala yang digunakan untuk mengukur *Carbon Emission Disclosure* adalah sebagai berikut.:

$$CED = \frac{\text{Jumlah skor dari item yang diungkapkan}}{\text{Nilai maksimal skor pengungkapan}}$$

Keterangan

CED : *Carbon Emission Disclosure*

2.4.4 Good Corporate Governance (Z)

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang digunakan dalam mengelola kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik dan efektif, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang tepat. Sistem ini memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen, guna mencapai tujuan organisasi sekaligus memastikan bahwa perusahaan menjalankan prinsip keberlanjutan yang seharusnya dipenuhi (Sary et al., 2025). Pengukuran variabel *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proporsi anggota dewan komisaris yang independen sebagai indikator tata kelola perusahaan. Dewan komisaris merupakan bagian penting dalam pemerintahan perusahaan yang baik tugas mereka adalah memastikan bahwa strategi perusahaan dijalankan dengan benar, mengawasi cara manajemen mengoperasikan perusahaan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas selalu diikuti (Roihanah & Akbar, 2024). Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan finansial, keluarga, kepemilikan, atau

hubungan bisnis dengan perusahaan, sehingga dapat melakukan pengawasan dengan cara yang objektif dan mandiri. Di rumuskan sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{jumlah Dewan Komisaris}}$$

Keterangan:

PDKI	:	Proporsi dewan komisaris independen
Jumlah Komisaris Independen	:	Total anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga, kepemilikan dengan perusahaan
Jumlah Dewan Komisaris	:	Seluruh anggota dewan komisaris, baik independen maupun non-independen

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Meskipun bersifat tentatif, namun harus dapat diuji melalui data empiris yang dikumpulkan selama penelitian (Sekaran & Bougie, 2019).

2.5.1 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Kinerja Lingkungan

Green Accounting merupakan kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, pengukuran, dan penyampaian informasi tentang aspek lingkungan dan keuangan perusahaan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk memperhatikan dampak terhadap lingkungan dalam berbagai kegiatan perusahaan sekaligus membantu mengendalikan dan menghemat biaya perusahaan (Dwianika et al., 2024). *Green Accounting* bertujuan untuk menilai berapa banyak uang yang perlu dikeluarkan perusahaan terkait dengan lingkungan. Tujuan utama dari *green accounting* adalah untuk mengurangi pengeluaran yang terkait dengan dampak

lingkungan atau sosial, sehingga perusahaan bisa menghindari biaya tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor itu dari perspektif perusahaan (Maulida et al., 2023).

Menurut Freeman (1984), *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa organisasi tidak hanya harus berfokus pada menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga harus bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan (Rahmadhani et al., 2021).

Menurut Purwaatmojo & Ratmono, (2024) mengungkapkan bahwa *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan kinerja lingkungan (Angelina & Nursasi, 2021; Bellamy et al., 2023).

H1: *Green Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan

2.5.2 Pengaruh *Carbon Emmision Disclosure* terhadap Kinerja Lingkungan

Carbon Emission Disclosure merupakan pengungkapan informasi mengenai terjadinya karena pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon, seperti karbon dioksida, LPG, solar, dan bahan bakar lainnya, yang akhirnya dilepaskan ke atmosfer (Shafira, 2024). *Carbon Emission Disclosure* dilakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (Arsy & Amin, 2025). *Carbon Emission Disclosure* dapat timbul dari aktivitas alami maupun dari tindakan manusia. Contoh yang bersifat alami dari sumber-sumber tersebut antara lain mencakup pernapasan serta pelepasan yang terjadi di dalam lautan. Adapun emisi karbon yang berasal dari aktivitas manusia meliputi deforestasi, pembakaran

bahan bakar fosil, kegiatan industri, dan transportasi (Shafira, 2024).

Teori Stakeholder menjelaskan cara hubungan antara sebuah perusahaan dengan berbagai pihak yang mempunyai kaitan atau minat terhadap kegiatan perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan bisa berupa orang, kelompok, komunitas, atau masyarakat, baik seluruhnya maupun sebagian, yang memiliki kepentingan dan hubungan dengan perusahaan (Hadiani & Mulyani, 2023).

Menurut (Septiana & Ardiana, 2024) mengungkapkan bahwa *Carbon Emmision Disclosure* berpengaruh positif pada kinerja lingkungan. Yosua, (2024) mengungkapkan bahwa *carbon emission disclosure* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *carbon emission disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan kinerja lingkungan (Almuaromah & Wahyono, 2022; Damas et al., 2021; Hadiani & Mulyani, 2023).

H2: *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan

2.5.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lingkungan

Good corporate governance dilihat dari adanya komisaris yang independen, karena komisaris independen bertugas mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik serta transparan. Ketika sebuah perusahaan mampu mengelola bisnisnya dengan baik, hal itu akan membuat investor semakin percaya, sehingga mereka lebih suka menyisihkan dana untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Setyaningrum & Fidiana, 2022). Selain mengelola perusahaan dengan baik, penting juga untuk memperhatikan bagaimana perusahaan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Perusahaan wajib menjaga lingkungan hidup agar bisa meningkatkan citra dan image perusahaan, sehingga meningkatkan

loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut akhirnya akan memicu keinginan investor untuk memasukkan dana mereka ke dalam perusahaan tersebut (Sari et al., 2022).

Teori Agency menyatakan bahwa adanya komisaris independen dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan adanya pengawasan yang berjalan dengan baik, manajemen tidak hanya diharuskan memprioritaskan pencapaian laba saja, tetapi juga diingatkan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan usaha yang berkelanjutan jangka panjang.

Menurut Adiwuri & Nurtleli,(2022) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hasil temuan ini turut diperkuat oleh penelitian Sari et al. (2022) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berperan dalam memperkuat pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan

H3: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan

2.5.4 *Green accounting* terhadap kinerja lingkungan dimoderasi *Good Corporate Governance*

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), *good corporate governance* adalah sebuah sistem yang dibuat untuk memandu pengelolaan perusahaan agar berjalan secara profesional, Sistem ini didasari oleh beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Fitriyani & Sungkar, 2024). Menurut puni & Anlesinya, (2020) Tata kelola

didefinisikan sebagai salah satu sistem yang digunakan untuk memandu dan mengendalikan berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. *Good corporate governance* juga melibatkan cara mengatur penyebaran tugas, hak, dan tanggung jawab antara berbagai pihak dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajer, serta semua pihak yang memiliki kepentingan tetapi bukan pemegang saham.

Teori Kontingensi menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin dalam berbagai jenis organisasi. Kinerja seorang pemimpin dapat dilihat berdasarkan pemahamannya terhadap situasi dan kondisi perusahaan yang dipimpinnya (Safitri et al., 2020). Menurut (Sary et al., 2025) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak memoderasi pengaruh *Green Accounting* terhadap kinerja lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* belum mampu memperkuat pengaruh penerapan *green accounting* terhadap kinerja lingkungan (Putri et al., 2024).

H4: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Green Accounting* terhadap Kinerja Lingkungan

2.5.5 *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kinerja Lingkungan dimoderasi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah cara atau sistem dalam mengelola operasi sebuah lembaga dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Sistem ini memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen, agar tujuan organisasi tercapai sekaligus memastikan perusahaan

menjalankan prinsip keberlanjutan yang seharusnya dilakukan (Sary et al., 2025). Adanya sistem *good corporate governance* yang berfungsi sebagai variabel moderasi dapat membantu dalam menganalisis kondisi perusahaan, sehingga perusahaan menjadi lebih sensitif terhadap aktivitas yang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan kinerja lingkungan. Selain itu, sistem ini juga dinilai efektif dalam mendukung pencatatan melalui penerapan *green accounting*, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan perusahaan (Ramadhani et al., 2022).

Adanya teori kontingensi menyatakan bahwa bahwa ada variabel lain yang bisa memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Lesmana & Kesaulya, 2022). Menurut (Rahman & Damayanti, 2024) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak memoderasi pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak dapat memperkuat pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap kinerja lingkungan.

H5: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Kinerja Lingkungan